
GLOBALISASI: EKSPLOITASI ATAU KEBEBASAN PEREMPUAN?

Sahrina Safiuddin^{1*}, Israwati²

^{1,2}, Universitas Halu Oleo

*Email Korespondensi: sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id

Abstract :

Abstract: *Freedom should be an absolute thing for all individuals to have regardless of gender. However, since the creation of society, women's freedom has always been restricted. Men's rights and opportunities are still not equal to women's. Indonesian women have long started fighting for equality, driven by the development of the times and globalization, Indonesian women's struggle for equality is growing. The feminism movement aims to help women fight for women's rights and freedoms in Indonesian society which is still predominantly patriarchal. The purpose of this study is to determine the impact of globalization on women. The research method is by descriptive and interpretive literature study. The results of the literature study show that Globalization and women's involvement. First, argumentation and display of qualitative data in Indonesia show the role of women is improving in their involvement in public institutions. Second, the quantitative data argument shows that patriarchy and acts of violence against women are still problems faced by Indonesian women. Third, Globalization can stimulate and increase women's solidarity. Fourth, Globalization has not been able to improve the quality of life of women and lead to acts of violence against women. Fifth, the role of the state is needed in creating gender equality.*

Keywords: Globalization, Exploitation, Women's Freedom

Abstrak :

Abstrak Kebebasan seharusnya adalah hal yang absolut untuk dimiliki seluruh individu terlepas dari jenis kelaminnya. Namun, sejak terciptanya masyarakat, kebebasan perempuan selalu dibatasi. Hak dan kesempatan laki-laki hingga kini masih tidak setara dengan perempuan. Perempuan Indonesia sejak dahulu sudah mulai memperjuangkan kesetaraannya, didorong dengan berkembangnya zaman dan globalisasi, perjuangan perempuan Indonesia akan kesetaraan semakin berkembang. Gerakan feminisme bertujuan untuk membantu perempuan memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan di masyarakat Indonesia yang masih dominan patriarki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak globalisasi terhadap kaum perempuan. Metode penelitian adalah dengan studi literatur deskriptif dan interpretif. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa Globalisasi dan keterlibatan perempuan. Pertama, Argumentasi dan tampilan data-data kualitatif di Indonesia menunjukan peran perempuan makin membaik dalam keterlibatannya di lembaga publik. Kedua, Argumentasi data kuantitatif menunjukkan patriarki dan tindakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang dihadapi wanita Indonesia. Ketiga, Globalisasi mampu menstimulus dan meningkatkan solidaritas kaum perempuan. Keempat, Globalisasi belum mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menurunkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kelima, Diperlukan peran negara dalam menciptakan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Globalisasi, Eksploitasi, Kebebasan Perempuan

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang perempuan selalu merupakan salah satu topik yang menarik, baik antar perempuan lebih-lebih antar lelaki-tua atau muda. Dalam perspektif ilmu politik pembicaraan tentang perempuan tidak hanya menarik namun juga menghadirkan kutub-kutub ideologi yang mempengaruhi paradigma pemikiran setiap individu. Hasilnya kemudian menghadirkan banyak istilah dan teori mulai dari sudut pandang marxisme, sosialisme, liberalisme dan berbagai teori lain. Kaum marxisme melihat adanya hubungan antara kapitalisme dan patriarkhi, sementara kaum sosialis melihat kesetaraan berkaitan dengan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat, selanjutnya kaum liberal memandang reformasi struktur institusi menjadi cara untuk memperbaiki kesetaraan gender.

Transisi Indonesia menuju demokrasi telah membuka berbagai ruang bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ranah publik. Fakta tersebut diantaranya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik baik sebagai politisi, aktifis maupun pejabat publik di berbagai lembaga negara dan lain-lain. Akan tetapi capaian positif tersebut seolah berimbang dengan berbagai kejadian negatif yang melanda perempuan, dimana kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun semakin meningkat. Dengan kondisi demikian banyak pihak yang tertuduh sebagai ‘aktor pemicu’, salah satunya globalisasi.

Kaum perempuan, aktifis perempuan maupun ilmuwan dalam merespon globalisasi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidaklah memiliki suara yang utuh, selalu saja ada sikap yang menolak atau mendukung globalisasi. Disatu pihak ada yang beranggapan bahwa globalisasi merugikan namun juga ada yang takan perempuan. Dalam perdebatan yang lain pula bahwa globalisasi sebagai pembuka ruang terjadinya eksploitasi, sebagai lawannya adalah pembuka kebebasan terhadap perempuan. Singkat kata respon kehadiran globalisasi ada menganggap sesuatu yang positif, namun juga ada menganggap negatif. Melalui makalah ini akan mencoba menunjukkan sebuah fakta-fakta empirik dampak globalisasi.

Globalisasi mengacu pada sebuah proses (atau sejumlah proses) yang mewujudkan suatu transformasi dalam organisasi hubungan dan transaksi sosial mengenai tempat...menghasilkan arus transkontinental atau antar regional dan jaringan kegiatan interaksi dan latihan kekuasaan. Proses globalisasi merupakan segi dunia konteporer yang penting, kompleks dan kontradiktif, yang mengintegrasikan beberapa negara, ekonomi dan masyarakat kedalam jaringan arus global, sambil meminggirkan yang lain. Lebih lanjut Giddens menyebutkan bahwa globalisasi tidak hanya atau bahkan pada dasarnya, sebuah fenomena ekonomi, namun disejajarkan dengan kemunculan ‘sistem dunia’ dimana globalisasi sebenarnya menyangkut tranformasi ruang dan waktu.

Eksploitasi oleh kaum Marxis dipandang sebagai tindakan menggunakan tenaga kerja masyarakat untuk menghasilkan keuntungan sementara tidak mereka kompensasi secara adil. Kaum feminis melihat eksploitasi dilakukan oleh pria yaitu berkaitan dengan eksploitasi gender: 1). hasil kerja yang dikerjakan perempuan dianggap sebagai hasil kerja laki-laki dan 2). menganggap perempuan lemah atau tenaga laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Defenisi eksploitasi oleh kaum feminisme ini dikenal juga dengan patriarkhi yaitu istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok yang mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Sementara kebebasan menurut Franz Magnis Suseno adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan. Lebih lanjut Franz Magnis menyebutkan, bukan berarti bahwa setiap orang hidup menurut kemauannya sendiri, namun dalam bersikap harus tetap memikirkan orang atau lembaga lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan (library research). Teknik kepustakaan digunakan dengan alasan banyak informasi dan data tentang keterlibatan perempuan, dapat ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, sumber-sumber dari website yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai globalisasi, dan keterlibatan perempuan dalam politik.

Creswell memberikan pedoman dalam melakukan review literature sebagai berikut : 1. Begin with journal, 2. Next review related topic, 3. Follow their research by reading recent conference paper on a topic, 4. If time permits, look at the abstract of the dissertation abstracts later national. Penulis menggunakan review yang komprehensif terhadap artikel-artikel dan buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai globalisasi dan keterlibatan perempuan dalam politik. Untuk memulai tulisan literatur ini, tulisan ini menetapkan beberapa indikator apa yang dimaksud dengan globalisasi dan keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian literatur ini juga fokus pada publikasi-publikasi yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang berusaha menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang diperoleh. Untuk menghasilkan analisis yang lebih valid, peneliti juga menggunakan instrument-instrument analisis deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk menemukan terobosan baru, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik. Implikasi dari metode penelitian ini dimaksud agar dapat mencapai hasil yang sistematis, terarah dan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi dan keterlibatan perempuan

Salah satu tujuan dari globalisasi adalah menciptakan hubungan yang interkoneksi. Efek dari globalisasi adalah kebiasaan hidup lokal menimbulkan pengaruhnya secara global. Begitupun dalam konteks gerakan perempuan, dimana kejadian menimpa perempuan di negara lain dapat dengan mudah menimbulkan rasa solidaritas melalui hubungan interkoneksi tersebut. Pada kasus tersebut maka tentunya globalisasi menjadi peluang bagi aktifis perempuan untuk menyuarakan isu-isu yang diperjuangkan oleh kaum perempuan di seluruh dunia.

Di Indonesia sejak dibukanya ruang demokrasi 1998 gerakan perempuan menunjukkan keterlibatan aktif dalam bidang politik, terbukti dengan masuknya perempuan sebagai aktifis maupun pejabat dalam lembaga-lembaga negara. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh UNDP yang dirilis pada tahun 2010, tingkat keterlibatan perempuan ini semakin mengalami peningkatan, baik yang duduk sebagai anggota DPR/DPD, partai politik, pegawai negeri sipil maupun sebagai pejabat kepala pemerintahan.

Dalam hal keterwakilan perempuan diparlemen kasus Indonesia kecenderungan menunjukkan dinamika pada Pemilu masa orde lama dan orde baru. Sementara pada Pemilu era reformasi menunjukkan perubahan yang semakin meningkat dari setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Sejak pemilu 1955 tercatat perempuan yang menduduki kursi parlemen mencapai 5,9 % kursi di parlemen, pada Pemilu 1971 perempuan mencapai 7,8 %, sementara pada Pemilu 1977 jumlah perempuan terpilih melorot dari menjadi 6,3 persen dan pada pemilu 1997 mencapai 10,8 %. Pada Pemilu 1999 keterwakilan perempuan melorot menjadi 9 persen,

namun demikian kondisi ini mengalami peningkatan pada pemilu 2019 yaitu mengalami peningkatan menjadi 20,5% . Tentu ini adalah capaian tertinggi yang pernah di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik, meskipun kenaikannya tidak signifikan tetapi tentu ini perlu di apresiasi tentang kenaikan presentasi representasi perempuan di parlemen..

Berikut ini adalah tabel data representasi perempuan di politik sebelum masa reformasi sampai pemilu terakhir yaitu 2019.

Periode	Perempuan	Laki-Laki
1950-1955	9 (3,8 %)	236 (96,2 %)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2 %)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Sumber :dikutip dari berbagai sumber

Dari berbagai fakta tersebut menimbulkan asumsi-asumsi sekaligus pertanyaan, dimana Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh PDI.P yang mana partai tersebut sebagaimana kita ketahui dipimpin oleh seorang perempuan namun nampaknya tidak mampu meningkatkan keterwakilan perempuan. Dengan demikian menghadirkan sebuah asumsi adalah bahwa kemenangan atau kepemimpinan politisi perempuan belum tentu mendongkrak keterwakilan perempuan. Asumsi ini tentunya terbantahkan jika melihat hasil Pemilu 2019 dimana keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Akan tetapi kenaikan ini tentunya harus pula dihubungkan dengan adanya kuota 30 % perempuan di Parlemen. Dengan demikian poin yang harus dilihat adalah bahwa kepemimpinan politik yang dipegang oleh perempuan dan keterlibatan perempuan sebagaimana diutarakan oleh Amartya Sen , tidak menjamin perbaikan hak-hak perempuan perempuan, namun kaum perempuan juga harus melakukan gerakan-gerakan atau perjuangan guna memenuhi keterwakilan perempuan, salah satunya perjuangan kuota 30 %.

Perkembangan peran perempuan sejak dibukanya demokratisasi di Indonesia tidak hanya diparlemen namun juga dibidang lain. Dimana pada tahun 2019, dari 33 orang gubernur yang terpilih salah satunya adalah perempuan (Gubernur Jawa Timur), (Walikota Singkawang), (Bupati Purwakarta), (Walikota Mojokerto), (Bupati Tulang Bawang) , (Bupati Musi Rawas), (Walikota Tanjung Pinang), (Walikota Bandar Lampung), (Bupati Serang),

(Bupati Buru), (Bupati Luwu Utara). Pada tahun yang sama dari 440 Kabupaten/Kota, Terdapat 10 Bupati/Walikota (2,27 %). Sementara dari empat ratus dua (402) posisi wakil Bupati/Walikota, 12 (atau 2,27 %) adalah perempuan, meskipun terdapat 38 posisi untuk Wakil Bupati/Walikota. Selain itu jumlah perempuan yang menjabat Kepala Desa mencapai 3,91 % sisanya dijabat oleh laki-laki.

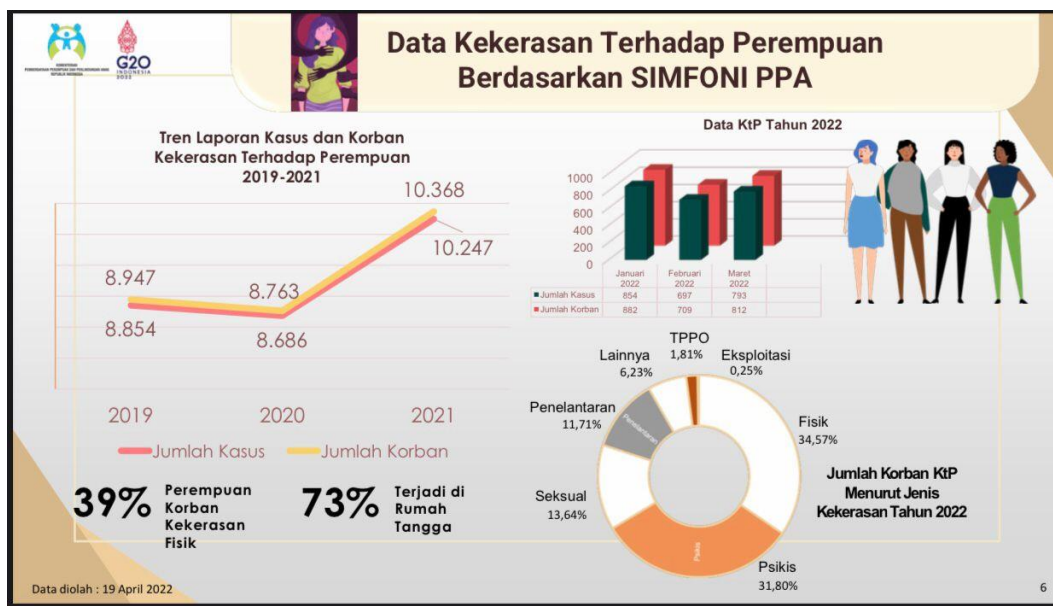
Pada sektor pelayanan publik tercatat 45,4 diisi oleh perempuan, namun untuk jabatan eselon didominasi oleh laki-laki. Jabatan eselon I jumlah perempuan hanya 8.72 %, eselon II 44.98 %, eselon III 46.78 %, dan eselon IV 48.07 %. Sementara di jajaran kabinet keterlibatan perempuan pada tahun 1999 mencapai 8,33 %, tahun 2004 7,69 %, dan pada tahun 2019 mencapai 11,7 %, capaian ini lebih buruk bila dibandingkan dengan tahun 1997 dimana perempuan yang ada di Kabinet mencapai 14,71 %. Ditingkat komisi nasional jumlah perempuan hanya 33 %, dan di Komisi Pemilihan Umum 43 % anggotanya adalah perempuan jika dibandingkan sebanyak 57 % anggota laki-laki, sementara di KPUD, keterwakilan perempuan hanyalah sebesar 19 persen. Selanjutnya ditingkat peradilan jumlah perempuan hanya 24,2 %. Persentase lebih kecil terlihat dilembaga kepolisian dimana hanya 3,5 % polisi perempuan dan diangkat bersenjata TNI perempuan yang memiliki jabatan menengah hanya berjumlah 14 %. Persentase perempuan menunjukkan dominasinya dalam jumlah tenaga kerja dimana sebanyak 68,6 % merupakan perempuan dan sisanya 31,4 diisi oleh laki-laki. Persentase yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan ditemui dalam dunia pendidikan dimana sebanyak 18.924.883 jiwa adalah perempuan dan laki-laki sebanyak 19.844.493 jiwa.

Evaluasi yang dapat dilakukan dari fakta tersebut adalah bahwa meskipun keterlibatan perempuan dilembaga pemerintahan menunjukkan tren yang semakin meningkat namun demikian kondisi ini tentunya belum sebanding dengan persentase penduduk perempuan dan laki-laki dimana berdasarkan sensus penduduk tahun 2021, jumlah penduduk perempuan lebih dominan dibanding laki-laki. Lebih jauh capaian diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih mudah dicapai di bidang politik dibanding melalui jabatan karir. Kenyataan ini tentunya menimbulkan sebuah asumsi bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam melakukan seleksi kepemimpinan ditingkat jabatan karir masih terjadi. Begitupun kenyataan yang kurang menggembirakan adalah dimana dari mayoritas warga negara, perempuan mengambil peran yang dominan dalam lapangan pekerjaan. Fakta yang menggembirakan justru terjadi di dunia pendidikan dimana jumlah perempuan dan laki-laki adalah berimbang, yang mana capaian ini tentunya dapat mendistorsi anggapan umum bahwa perempuan bukanlah warganegara minim pendidikan.

Globalisasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam ruang publik harapannya adalah semakin terciptanya kesetaraan, terlindunginya kaum perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai warga negara. Akan tetapi tesis tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan terbantahkan, dimana terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) di Indonesia. Dalam catatan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan menunjukkan bahwa dari sepuluh tahun terakhir, hanya satu tahun kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan trend penurunan namun demikian persentase ini terhitung masih sangat tinggi, sisanya selama sembilan tahun kekerasan mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu antara tahun 2019-2022. Lebih lengkap ditunjukkan dengan tabel berikut:

Gambar.1.1.
Jumlah Korban KTP Tahun 2022



Sumber: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan, 2022

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang masih dihadapi perempuan di era globalisasi. Daerah Jawa, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dan fisik merupakan wilayah dan bentuk yang dominan terjadinya kasus KTP. Di luar kasus tersebut masih banyak hal yang dihadapi oleh seorang perempuan khususnya berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan diarah negara seperti kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu contoh kebijakan daerah diskriminatif yang hadir di tahun 2010 ini adalah Peraturan Bupati Aceh Barat No. 5 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2010. Peraturan Bupati ini melarang perempuan memakai pakaian dan celana ketat. Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalah masih tingginya angka kekerasan fisik yaitu 39% pada tahun 2019, seksual 13,64%, penelantaran, 11,71%, eksploitasi 0,25%, psikis 31,80%, KDRT yang terjadi yaitu 73% pada tahun 2021.

Dalam perebutan kekuasaan politik, perempuan juga merupakan pihak yang sering dikorbankan dalam era demokratisasi dan globalisasi. Fenomena ini kerap kali terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia pasca reformasi, seperti: kasus politisi Yahya Zaini, Ketua KPK Antasari Azhar, dan politisi PDI.P Max Moein. Bahkan eksploitasi terhadap perempuan pada tahun 2021 0,11% terlihat jelas dalam persetujuan antara KPK dan DPR yang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota Badan Anggaran. Disela-sela persetujuan kedua lembaga negara tersebut beberapa kelompok perempuan melakukan aksi demonstrasi dengan memperlihatkan kemolekan tubuh. Kondisi ini mengingatkan kita pada aksi militansi kaum aktifis perempuan di beberapa negara di dunia yang memprotes kebijakan anti perang maupun kebijakan yang dipandang merugikan kaum perempuan. Yang mana bila dihubungkan dengan persoalan badan anggaran posisi perempuan tidaklah dirugikan pada posisi tersebut. Selain itu masalah-masalah lain yang dihadapi oleh kaum perempuan adalah berkaitan dengan kebebasan berekspresi seperti mengikuti konteks Putri Indonesia.

Evaluasi yang dapat dikritisi dari fakta diatas bahwa peningkatan keterlibatan perempuan tidak secara otomatis menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan atau mengatasi masalah perempuan. Di sisi lain di era globalisasi perempuan menjadi bahan eksploitasi para kapitalis untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

KESIMPULAN

Pertama, Argumentasi dan tampilan data-data kualitatif di Indonesia menunjukan peran perempuan makin membaik dalam keterlibataannya di lembaga publik. Kedua, Argumentasi data kuantitatif menunjukkan patriarkhi dan tindakan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang dihadapi wanita Indonesia. Ketiga, Globalisasi mampu menstimulus dan meningkatkan solidaritas kaum perempuan. Keempat, Globalisasi belum mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menurunkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kelima, Diperlukan peran negara dalam menciptakan kesetaraan gender.

Solusi: Perlunya pengembangan kewarganegaraan berorientasi jender yaitu geunder-neutral dan differentiated gender. Konsep geunder neutral yaitu menganut prinsip dan praktek kewarganegaraan membuka kemungkinan bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai perempuan untuk berpartisipasi sebagai rekan yang sederajat dengan laki-laki di wilayah publik. Sementara konsep differentiated gender yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan pada peran dan tanggung jawab perempuan di wilayah privat. (Nuri Suseno, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Beilharz, Peter. *Social Theory: A Guide to Chentral Thinkers*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2002.
- Giddens, Anthony. *Beyond Left and Right: The Futureof Radical Politics*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009.
- Harris, John et.all. *Politik Demokrasi Lokal Baru*. Jakarta: Demos, 2004.
- Held, David. et.all, *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Oxford: Polity, 1999.
- Irhomi, T.O. (Penyunting). *Kajian wanita dalam pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Jhon . Creswell, 1994, *Research Design: Qualitative,Quantitative,Quantitative And Mixed Methods Approaches* :London:Sage Publication.
- Komnas Perempuan. *Teror Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan Ktp Tahun 2010*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Suseno, Nuri. *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi dan Isu-isu konteporer*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011.
- UNDP, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP, 2010.
- Young, Iris M. *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press, 1990.